Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 4 Tahun 2024, pp. 688 – 705
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5965
■ Received 08/09/2025 ■ Revised 15/09/2025 ■ Accepted 15/09/2025

Relasi Kuasa dan *Klientelisme* pada Budaya Politik Masyarakat Miskin Indonesia: Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Wimmy Haliim[1*], Mochammad Fatkhurrohman [2]
[1)2)] Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email correstpondence: wimmyfisip@ub.ac.id*

Keywords :
Political Culture, Power Relations, and Poor Society.

Kata Kunci :
Budaya Politik, Relasi Kuasa, dan Masyarakat Miskin.

Abstract
This article examines power-relations and the political culture of the Indonesian poor in a socio-political context. This theoretical study of political culture aims to understand how power relations, such as patron-client relationships, are formed, developed, and influence the political dynamics of the poor. This article seeks to understand political culture as patterns of behavior, attitudes, and values held by society in relation to the political system. A qualitative research method was chosen for two purposes: first, to limit the study; and second, the research focus is tentative or temporary, allowing for changes when researchers encounter interesting things during data collection in the field. The author shows that political culture in Indonesia is shaped by a long history, ethnic and religious plurality, and socio-economic dynamics. In the context of the poor, this is caused by knowledge about politics that is often monopolized by the ruling elite. The study examines the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Malang Regency, where there is a power-relations between PKH facilitators and beneficiary families. This has limited access for the poor to accurate and critical political information, resulting in low political awareness and even participation that appears manipulative.

Abstrak
Artikel ini membahas relasi kuasa dan budaya politik relasi kuasa masyarakat miskin Indonesia dalam konteks sosial-politik. Kajian teoretis budaya politik ini bertujuan untuk memahami bagaimana relasi-kuasa seperti hubungan patron-klien terbentuk, berkembang, dan memengaruhi dinamika politik masyarakat miskin. Artikel ini berusaha memahami budaya politik sebagai pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam kaitannya dengan sistem politik. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memiliki dua tujuan, yaitu pertama, untuk membatasi kajian, dan kedua, fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara sehingga bisa jadi fokus penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik selama pengumpulan data di lapangan. Penulis menunjukkan bahwa budaya politik di Indonesia dibentuk oleh sejarah panjang, pluralitas etnis dan agama, serta dinamika sosial-ekonomi. Dalam konteks masyarakat miskin, hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan tentang politik yang seringkali dimonopoli oleh elit penguasa. Studi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang, di mana terdapat relasi kuasa antara pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat. Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap informasi politik yang akurat dan kritis yang berakibat pada rendahnya kesadaran politik dan bahkan partisipasi yang terkesan manipulatif.

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu politik yang berhubungan dengan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam masyarakat terkait dengan sistem politik. Kajian teoritis budaya politik ini bertujuan untuk memahami bagaimana budaya politik terbentuk, berkembang, dan berpengaruh terhadap dinamika politik suatu negara. Budaya politik tulisan ini dipahami sebagai pola-pola perilaku, sikap, dan nilai yang dianut oleh masyarakat dalam kaitannya dengan sistem politik. Kajian teoritis budaya politik memberikan kerangka untuk memahami berbagai dinamika politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana teori-teori budaya politik dapat diaplikasikan untuk menganalisis budaya politik masyarakat Indonesia.

Budaya politik adalah pola perilaku, sikap, dan nilai yang dipegang oleh anggota dalam suatu sistem dalam kaitannya dengan kehidupan politik (Pureklolon, 2021). Masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman budaya politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, pendidikan, ekonomi, dan agama. Artikel ini menghubungkan kajian teoritis budaya politik dengan budaya politik masyarakat miskin di Indonesia, mengidentifikasi bagaimana kemiskinan mempengaruhi orientasi dan partisipasi politik.

Budaya politik dapat didefinisikan sebagai keseluruhan nilai, keyakinan, sikap, dan orientasi yang mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut Almond & Verba (1963) dalam karya klasik mereka yang berjudul The Civic Culture, mendefinisikan budaya politik sebagai pola orientasi psikologis terhadap objek-objek politik. Beberapa teori utama tentang budaya politik antara lain Teori Struktural-Fungsionalisme: Almond & Verba (1963) dalam bukunya, melakukan identifikasi tiga tipe budaya politik, yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Budaya parokial ditandai oleh rendahnya kesadaran politik, budaya subjek oleh penerimaan pasif terhadap otoritas politik, dan budaya partisipan oleh keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik.

Teori Modernisasi Inglehart (1997)mengembangkan teori bahwa perubahan nilai-nilai politik dari materialistik ke post-materialistik terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemakmuran. Teori ini menjelaskan bagaimana transformasi ekonomi dan sosial dapat mengubah budaya politik. Kemudian Teori Ekologi Politik Wildavsky (1987) yang mengemukakan bahwa budaya politik dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan fisik dan sosial dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurutnya, terdapat empat subkultur politik utama: hierarki, egalitarian, individualis, dan fatalis.

Faktor-Faktor Pembentuk Budaya Politik

Budaya politik dapat diamati bahwa hal tersebut dibentuk oleh berbagai faktor yaitu sejarah dan tradisi, pendidikan dan sosialisasi politik, ekonomi dan kelas sosial, dan juga Ideologi beserta agama yang ada pada masyarakat (Pureklolon, 2021). Faktor sejarah dan tradisi menjelaskan bagaimana pengalaman

sejarah suatu negara, seperti penjajahan, perang, dan revolusi, dapat membentuk budaya politik yang khas. Kemudian, faktor pendidikan dan sosialisasi Politik menjelaskan bagaimana proses sosialisasi politik melalui keluarga, sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat mempengaruhi pembentukan nilai dan sikap politik individu. Selanjutnya faktor ekonomi dan kelas sosial menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi dan stratifikasi sosial turut menentukan orientasi politik warga negara. Terakhir, faktor agama dan ideologi menjelaskan bahwa keyakinan agama dan ideologi yang dianut oleh masyarakat juga berperan besar dalam membentuk budaya politik.

Budaya politik yang partisipatif dan pluralistik dianggap mendukung keberlangsungan demokrasi. Budaya politik yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan menghargai keberagaman pendapat dapat memperkuat institusi demokratis (Suhantoro et al., 2025). Dalam wilayah kajian teoritis budaya politik menunjukkan bahwa dirinya merupakan elemen penting dalam memahami dinamika politik suatu negara. Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli memberikan wawasan tentang bagaimana budaya politik terbentuk dan berfungsi dalam konteks yang berbeda. Faktor-faktor seperti sejarah, pendidikan, ekonomi, dan agama memainkan peran kunci dalam pembentukan budaya politik. Dengan demikian, memahami budaya politik dapat membantu kita dalam menganalisis dan memprediksi perilaku politik di berbagai negara.

Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Budaya politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang negara ini, termasuk masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan periode reformasi. Pengaruh agama, suku, dan adat istiadat juga berperan penting dalam membentuk budaya politik Indonesia yang kompleks dan beragam. Almond & Verba (1963) menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan karakteristik dari ketiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan. Di daerah-daerah terpencil, masih ditemukan budaya politik parokial dimana kesadaran politik relatif rendah. Di sisi lain, pada kota-kota besar, terdapat budaya politik partisipan yang ditandai dengan partisipasi aktif dalam proses politik.

Sementara itu, teori modernisasi yang dikemukakan oleh Inglehart (1997) dapat diaplikasikan untuk memahami perubahan nilai-nilai politik di Indonesia sejak era reformasi. Dengan meningkatnya ekonomi dan pendidikan, terdapat pergeseran nilai dari materialistik ke post-materialistik, dimana isu-isu seperti hak asasi manusia dan lingkungan mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Selanjutnya Wildavsky (1987) mengemukakan bahwa budaya politik dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan fisik dan sosial dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, keragaman geografis dan etnis berkontribusi pada adanya berbagai subkultur politik yang berbeda di tiap daerah. Misalnya, budaya politik di Jawa cenderung lebih hierarkis dibandingkan dengan budaya politik di Bali yang lebih egalitarian.

Sejarah panjang yang telah dilalu oleh Indonesia, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan telah membentuk budaya politik yang khas. Misalnya, sistem patronase yang kuat pada masa kerajaan masih mempengaruhi praktik politik hingga saat ini (Husen, 2024; Aspinall & Berenschot, 2019; Patmah & Mayrudin, 2025). Proses sosialisasi politik melalui pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk orientasi politik warga negara Indonesia. Pendidikan politik yang inklusif dan kritis sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik yang aktif, kritis, dan sadar (Syahdanul & Muhammad, 2025). Faktor yang juga tidak kalah penting adalah ketimpangan ekonomi dan stratifikasi sosial di Indonesia yang memiliki andil dalam mempengaruhi budaya politik. Kelas menengah yang semakin berkembang cenderung lebih kritis dan aktif dalam politik dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih miskin (Mudhoffir et al., 2023). Faktor lainnya adalah Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan nilai-nilai Islam sangat mempengaruhi budaya politik di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, keberagaman agama dan ideologi juga memperkaya dinamika politik di Indonesia.

Pengaruh Budaya Politik Terhadap Demokrasi di Indonesia

Budaya politik yang berkembang di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kualitas demokrasi di negara ini. Budaya politik yang partisipatif dan inklusif dapat memperkuat institusi demokratis, sementara budaya politik yang parokial atau subjek dapat menghambat proses demokratisasi. Kajian teoritis budaya politik memberikan wawasan yang berharga untuk memahami budaya politik masyarakat Indonesia. Berbagai teori, seperti struktural-fungsionalisme, modernisasi, dan ekologi politik, membantu kita menganalisis bagaimana nilai, sikap, dan orientasi politik terbentuk dan berkembang di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang membentuk budaya politik, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia (Bakry et al., 2024).

Budaya politik di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang, pluralitas etnis dan agama, serta dinamika sosial ekonomi. Masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan (Almond & Verba, 1963). Budaya politik ini bervariasi di berbagai daerah dan kelompok sosial, termasuk masyarakat miskin. Banyak masyarakat miskin di Indonesia menunjukkan karakteristik budaya politik parokial. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap informasi politik menyebabkan minimnya kesadaran dan partisipasi politik. Mereka sering kali merasa tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh terhadap keputusan politik.

Masyarakat miskin juga sering terjebak dalam sistem patronase dan klientelisme, di mana dukungan politik ditukar dengan bantuan materi dari elit politik. Hal ini memperkuat budaya politik subjek, di mana masyarakat menerima otoritas politik tanpa banyak pertanyaan atau kritik (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Akses yang terbatas terhadap pendidikan formal juga menyebabkan rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat miskin. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap hak-hak politik dan proses demokratis. Ketimpangan ekonomi yang tinggi memperkuat stratifikasi sosial, yang menghambat partisipasi politik aktif di kalangan masyarakat miskin. Mereka sering kali merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam politik.

Budaya politik masyarakat miskin di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sistem patronase. Untuk memahami lebih dalam bagaimana relasi kuasa mempengaruhi budaya politik masyarakat miskin, perspektif Michel Foucault menawarkan kerangka analisis yang penting. Foucault menyoroti bagaimana kekuasaan tidak hanya beroperasi secara represif tetapi juga produktif, membentuk pengetahuan, dan perilaku masyarakat (Foucault, 1977).

Kurangnya program sosialisasi politik yang efektif di daerah-daerah miskin menyebabkan minimnya pengetahuan tentang mekanisme politik dan hak-hak warga negara. Sosialisasi politik yang terjadi lebih sering bersifat informal dan didominasi oleh hubungan patronase. Nilai-nilai agama dan tradisional juga mempengaruhi orientasi politik masyarakat miskin. Di beberapa daerah, pemimpin agama memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan preferensi politik masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016). Budaya politik yang parokial dan ketergantungan pada patronase di kalangan masyarakat miskin dapat menghambat proses demokratisasi. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terus berlanjut memperlemah institusi demokratis dan memperkuat kekuasaan elit politik.

Memahami bahwa budaya politik masyarakat miskin seringkali dibentuk oleh keterbatasan akses informasi, patronase, dan ketimpangan sosial, penting untuk meninjau bagaimana relasi kuasa bekerja dalam praktik kebijakan publik yang menyasar kelompok ini. Salah satu konteks yang relevan adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan sosial berskala nasional. PKH bukan hanya program bantuan bersyarat, tetapi juga arena interaksi antara negara, pendamping, dan penerima manfaat, sehingga membuka kemungkinan terbentuknya relasi kuasa yang bersifat patron-klien.

Penelitian tentang patronase dan klientelisme dalam politik Indonesia telah banyak dilakukan. (Scott, 1972) dan (Geertz, 1960) menegaskan bagaimana hubungan patron-klien berakar dalam struktur sosial tradisional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Aspinall & Sukmajati (2016) serta Aspinall & Berenschot (2019) menguraikan patronase dan politik uang dalam dinamika elektoral Indonesia, sedangkan penelitian Hadiz (2010) dan Husen (2024) menekankan relasi patron-klien sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan elit lokal. Namun, studi-studi tersebut lebih banyak menyoroti klientelisme pada konteks pemilu dan kontestasi politik secara umum. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan relasi kuasa dan klientelisme dalam konteks program bantuan

sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana praktik bantuan sosial bukan hanya menjadi instrumen kebijakan publik, tetapi juga membentuk pola relasi kuasa dan budaya politik masyarakat miskin secara lebih subtil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki dua maksud yaitu, pertama, untuk membatasi studi, dan kedua, sebagai kriteria inklusi-eksklusi, dimana kriteria ini dapat memudahkan peneliti dalam memilah data sesuai kebutuhan. Dengan seperti itu, peneliti tidak dipersulit terhadap data-data yang terlalu banyak dan pada akhirnya akan mempersulit dalam proses analisis data. Lebih lanjut, di dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara, sehingga bisa jadi fokus penelitian berubah ketika peneliti menemukan hal yang menarik selama pengumpulan data di lapangan (Moleong, 1989).

Selanjutnya Bogdan & Taylor (1975) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Koentjaraninggrat (1983) melihat penelitian kualitatif merupakan penelitian di bidang ilmu kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, perilaku dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Tantra (1994) memberikan batasan formal mengenai penelitian kualitatif, yaitu sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap suatu dokumen, yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar.

Penelitian ini didukung data primer yang didapatkan dari para informan yang dilaksanakan pada Desember 2023 dan diperbarui pada Februari 2025 di Kabupaten Malang. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam relasi kuasa dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Terdapat informan utama, terdiri dari keluarga penerima manfaat (KPM) dan pendamping PKH. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan PKH. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan Moleong (1989), dengan dukungan kerangka teori relasi kuasa Michel Foucault sebagai alat interpretasi. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada

pertimbangan bahwa fenomena relasi kuasa dalam praktik PKH bersifat kontekstual dan kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam atas pengalaman subjektif informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

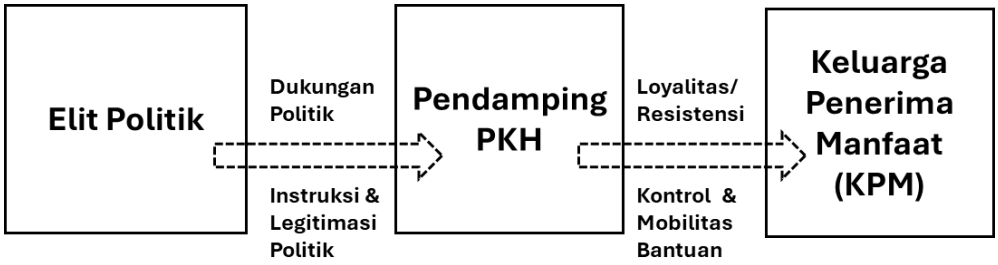
Relasi Kuasa dalam Teori Foucault

Michel Foucault mengembangkan konsep relasi kuasa yang menekankan bahwa kekuasaan tersebar dan beroperasi di berbagai tingkatan dalam masyarakat. Kekuasaan bukan hanya sesuatu yang dimiliki, tetapi juga sesuatu yang dilakukan melalui praktik diskursif dan institusional yang mengatur perilaku dan pikiran individu. Menurut Foucault & Gordon (1980), kekuasaan dan pengetahuan saling terkait satu sama lain, dimana kekuasaan menciptakan dan mendefinisikan pengetahuan, sementara pengetahuan memperkuat kekuasaan. Dalam konteks masyarakat miskin, pengetahuan tentang hak-hak politik dan mekanisme demokrasi sering dikontrol dan dibatasi oleh elit politik yang berkuasa.

Foucault (1977) memperkenalkan konsep disiplin sebagai bentuk kekuasaan yang mengatur perilaku individu melalui pengawasan dan normalisasi. Masyarakat miskin sering kali menjadi subjek dari mekanisme pengawasan yang ketat, baik melalui program bantuan sosial maupun kontrol politik oleh elit. Menurut Foucault & Gordon (1980) konsep pengetahuan tentang politik yang sering kali dimonopoli oleh elit yang berkuasa. Di kalangan masyarakat miskin, akses terhadap informasi politik yang akurat dan kritis sering dibatasi, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran politik dan partisipasi yang minimal. Ini adalah bentuk kekuasaan yang produktif karena menciptakan ketidaktahuan yang strategis.

Contoh nyata relasi kuasa dalam konteks budaya politik dilakukan oleh peneliti pada pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang, dimana terdapat relasi kuasa antara pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, relasi antara pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat dalam PKH merupakan dinamika kuasa yang kompleks.

Gambar 1: Model Konseptual Relasi-Kuasa PKH (Foucault dan Patron-Klien)



Sumber : Hasil Analisis Penelitian Lapangan Peneliti

Pendamping PKH memiliki kuasa dalam berbagai aspek, mulai dari identifikasi hingga pengawasan dan pengendalian. Namun, resistensi juga merupakan bagian dari relasi ini, karena keluarga penerima manfaat dapat mencoba melawan kuasa yang diberikan oleh program PKH. Analisis ini bertujuan untuk mengkritik PKH atau pendamping PKH serta untuk menggali dinamika kuasa dalam program bantuan sosial. Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, penting untuk mempertimbangkan bagaimana relasi kuasa dapat memengaruhi implementasi dan bagaimana resistensi dapat diatasi atau dikelola. Potensi relasi kuasa yang terbangun secara kultural ini perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan. Karena potensi hubungan relasi kuasa antara pendamping PKH dan KPM berevolusi menjadi hubungan patron-klien sangatlah besar.

> "P: Apakah Anda merasa bahwa dengan menjadi penerima PKH, Anda memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan politik terhadap salah satu calon pada Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Kabupaten Malang 2020? I: Iya, mas, ada. Soalnya ini ada tambahan bantuan PKH dari salah satu calon Bupati Malang (Sanusi-Didik). Dari pendamping, ada arahan nanti waktu pemilihan harus dukung dia, nanti saya dikasih bantuan (sembako). (Wawancara dengan L KPM PKH)

> "…kita ini harus loyal terhadap pimpinan, kalau saya biasanya sampling. Di pemilihan umum saya sampling, kita sudah terbiasa tahu peta. Daerah ini seperti ini. Misalkan di sini ada wakil tertentu 'sampean harus memenangkan ini, kita sudah sampling. Kalau suaranya kurang memenuhi sampean sebagai petugas partai komunikasi saja dengan orang ini. Apa yang dibawa, programnya apa dan memastikan apa… Saya tidak sok suci, karena politik itu hak semua orang untuk dipilih dan memilih. Walaupun saya pegawai negara harus loyal terhadap pimpinan dengan koordinasi yang matang, dalam artian sejalur. Jalan ini arahnya kemana, kita harus kemana, yasudah seperti itu." (Wawancara dengan AG Pendamping PKH)

Pendamping PKH adalah individu yang ditugaskan untuk membantu KPM dalam menjalani program PKH. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan informasi, mendukung proses administrasi, memonitor kemajuan KPM, dan menghubungkan KPM dengan sumber daya lain yang mungkin mereka butuhkan. Pendamping PKH memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial dan ekonomi di wilayah mereka. Di sisi lain, KPM adalah penerima manfaat dari program PKH. Mereka adalah keluarga yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan keuangan dari program PKH ini. KPM biasanya hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera dan memerlukan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan.

Gambar 2: Relasi Kuasa Pendamping PKH dan KPM



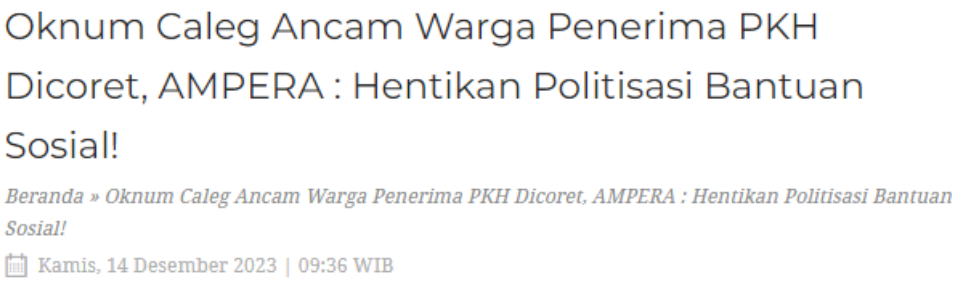
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Peneliti

Hubungan antara pendamping PKH dan KPM seringkali mencerminkan pola patron-klien. Pendamping PKH memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh KPM, sementara KPM membutuhkan bantuan dan akses ke sumber daya yang disediakan oleh pendamping PKH. Dinamika ini menciptakan hierarki yang dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana hubungan tersebut dikelola. Namun dari penelitian ini ditemukan hasil dari relasi kuasa antara dua aktor tersebut memiliki dampak negatif. Meskipun pendamping PKH memiliki peran yang penting dalam menjalankan program PKH, ada beberapa dampak negatif yang dapat terjadi dalam konteks hubungan patron-klien ini. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Normalisasi dan Praktik Patronase: Fenomena Politisasi Kebijakan Bantuan Sosial

Sistem patronase yang kuat di Indonesia bisa dilihat sebagai bentuk relasi kuasa dimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol dan mengatur perilaku masyarakat miskin. Bantuan materi atau keuntungan lainnya diberikan sebagai imbalan untuk dukungan politik, yang pada akhirnya menormalkan ketergantungan masyarakat miskin pada patron (Aspinall & Sukmajati, 2016). Program-program sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin sering disertai dengan pengawasan ketat dan aturan yang harus diikuti. Misalnya, bantuan langsung tunai atau program kesejahteraan lainnya mensyaratkan kepatuhan terhadap aturan tertentu yang diawasi oleh pemerintah. Ini mencerminkan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui disiplin dan pengawasan. Meskipun pada praktiknya, berbagai kebijakan sosial pengentasan kemiskinan sering kali dijadikan alat politik para elit, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Haliim, 2018, 2020, 2021, 2023; Haliim et al., 2024).

Gambar 3: Pemberitaan Politisasi PKH di Kabupaten Pemalang.



Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH Dicoret, AMPERA : Hentikan Politisasi Bantuan Sosial!

Beranda » Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH Dicoret, AMPERA : Hentikan Politisasi Bantuan Sosial!

Kamis, 14 Desember 2023 | 09:36 WIB

Sumber : Demokrasi (2025)

Tidak hanya PKH, pemerintah daerah yang diharapkan dapat membuat kebijakan sosial pengentasan kemiskinan juga melakukan politisasi yang berkedok bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT). Di Kota Depok, juga terjadi fenomena yang serupa, yaitu fenomena politisasi Kartu Depok Sejahtera (KDS) (Syafira, 2024).

Gambar 4: Pemberitaan Dugaan Politisasi Program Kartu Depok Sejahtera (KDS).



Dukung Program KDS, 38 Anggota DPRD Depok Sebut Harus Transparan dan Dinilai Penuh Nuansa Politisasi

Kamis, 9 Mei 2022 | 21:00 | 18 Views

KOTA DEPOK — Sejumlah 38 anggota DPRD Kota Depok, menetujui dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Namun, harus transparan dan jangan dipolitisasi. Bahkan, dinilai arogan dan kerap melakukan politisasi program dan pelanggaran undang-undang.

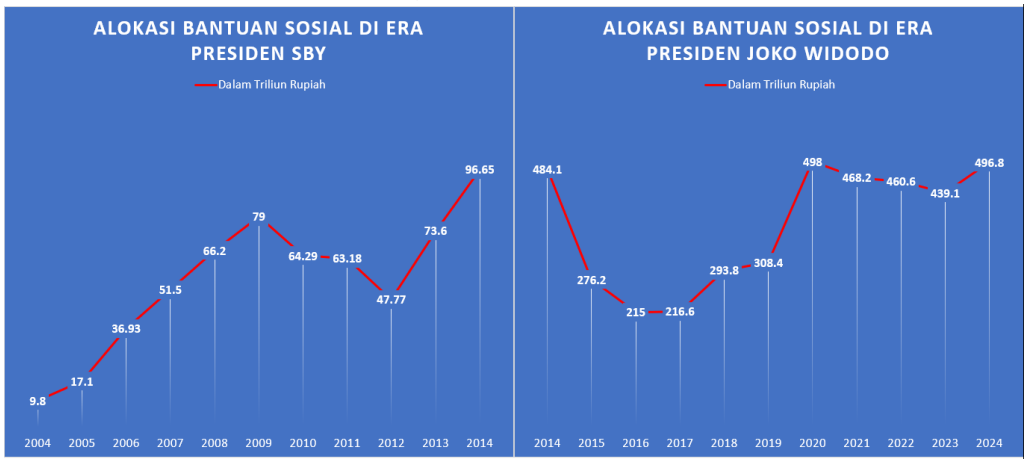
Sumber : Wartajurnalis (2025)

Fenomena politisasi kebijakan bansos atau BLT menguat kembali ketika pemilu presiden 2024 berlangsung. Bansos yang harusnya menjadi kegiatan rutin tahunan untuk memperkuat daya beli masyarakat direkayasa sedemikan rupa oleh Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Presiden Republik Indonesia untuk meraih simpati masyarakat. Dan simpati masyarakat tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat elektabilitas kandidat yang secara politis didukung

olehnya, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Firdausya & Urfan, 2024).

Menurut pengamatan peneliti, kebijakan bansos dinilai cukup efektif untuk meraih simpati masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dinilai memiliki angka yang cukup signifikan dalam konteks politik elektoral. alokasi bantuan sosial selalu meningkat ketika mendekati momen pemilu. Bahkan di era kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran bansos jauh lebih besar dari alokasi anggaran bansos pada era kepemimpinan SBY.

Gambar 5: Perbandingan Alokasi Bantuan Sosial Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo



Sumber : (Ridwan & Kamalina, 2025; Winarko, 2025)

Dalam konteks bantuan sosial, politisasi terjadi ketika distribusi bantuan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan atau kriteria objektif, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Para politisi atau partai politik sering kali menggunakan program bantuan sosial untuk membangun dan memperkuat basis dukungan mereka. Ini dilakukan dengan cara mendistribusikan bantuan kepada konstituen atau kelompok tertentu yang diharapkan dapat memberikan dukungan balik, baik dalam bentuk suara pada pemilihan maupun dukungan politik lainnya.

Dampak dari politisasi bantuan sosial ini adalah terbentuknya hubungan patron-klien antara pemberi bantuan (patron) dan penerima bantuan (klien). Dalam hubungan ini, masyarakat miskin penerima bantuan berada dalam posisi yang tergantung pada patron mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Ketergantungan ini sering kali membuat penerima bantuan merasa berhutang budi dan merasa wajib untuk memberikan dukungan politik kepada patron mereka. Hal ini mengakibatkan penerima bantuan terjebak dalam siklus ketergantungan yang sulit diputus.

Hubungan patron-klien ini tidak hanya merugikan penerima bantuan dari segi ketergantungan, tetapi juga berdampak negatif pada sistem politik dan pemerintahan yang lebih luas. Ketika bantuan sosial digunakan sebagai alat

politik, efisiensi dan keadilan distribusi bantuan sering kali terabaikan. Kebijakan yang seharusnya dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin menjadi terdistorsi oleh kepentingan politik. Akibatnya, bantuan sosial tidak mencapai target yang seharusnya dan justru memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, hubungan patron-klien juga dapat melemahkan partisipasi politik masyarakat miskin secara independen. Karena ketergantungan mereka pada patron, masyarakat miskin cenderung kurang kritis dan kurang berani menyuarakan pendapat atau kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka lebih cenderung mengikuti keinginan patron demi menjaga akses mereka terhadap bantuan. Ini mengakibatkan partisipasi politik yang bersifat transaksional dan tidak substantif, di mana keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh hubungan patron-klien daripada oleh proses demokrasi yang sehat.

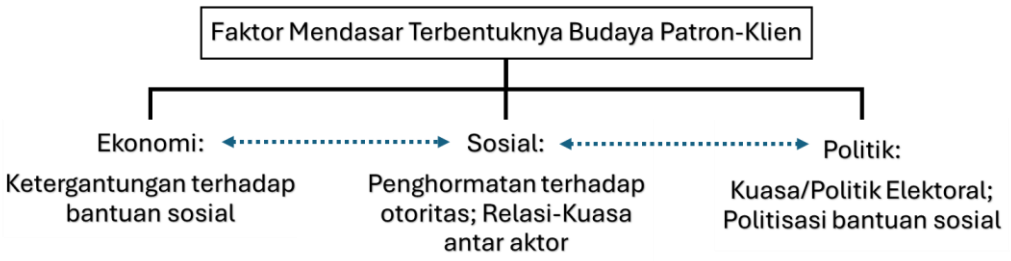
Politisasi kebijakan sosial bantuan sosial berdampak signifikan terhadap terbentuknya hubungan patron-klien di kalangan masyarakat miskin penerima program. Hubungan ini mengakibatkan ketergantungan penerima bantuan pada pemberi bantuan, melemahkan partisipasi politik independen, dan menghambat distribusi bantuan yang efisien dan adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendesain kebijakan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik agar bantuan sosial dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbentuknya Budaya Patron-Klien dalam Budaya Politik Masyarakat Miskin di Indonesia

Budaya patron-klien merupakan hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan (patron) dengan pihak yang bergantung (klien) (Ramadhan & Oley, 2019). Hubungan ini biasanya diwarnai oleh pemberian bantuan atau perlindungan dari patron kepada klien dengan imbalan dukungan atau kesetiaan dari klien. Di Indonesia, budaya patron-klien sering kali terlihat dalam dinamika politik, terutama di kalangan masyarakat miskin. Artikel ini akan membahas bagaimana budaya patron-klien terbentuk dalam budaya politik masyarakat miskin di Indonesia. Dalam hubungan ini, patron memberikan perlindungan atau sumber daya tertentu, sementara klien membalasnya dengan dukungan politik, sosial, atau ekonomi.

Literatur klasik (Scott, 1972; Geertz, 1960) menegaskan bahwa pola ini telah lama berakar dalam struktur sosial tradisional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, dalam konteks kontemporer, khususnya pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), relasi patron-klien mendapatkan bentuk baru yang lebih subtil tetapi berdampak signifikan. Pendamping PKH memegang otoritas dalam menyalurkan dan mengawasi bantuan, sementara keluarga penerima manfaat (KPM) menunjukkan loyalitas dan kepatuhan yang kadang berimplikasi pada pilihan politik.

Gambar 6: Faktor-faktor yang Membentuk Budaya Patron-Klien



Sumber: Hasil Analisis dan Olah Data oleh Peneliti

Patron menyediakan perlindungan atau sumber daya kepada klien, sementara klien memberikan dukungan politik, sosial, atau ekonomi sebagai imbalannya. Dalam konteks pertukaran sosial, Pertukaran sosial bisa memiliki efek langsung maupun tidak tidak langsung pada sebuah studi perilaku politik, preferensi poitik dan relasi interaksional antara masyarakat dan elite politik (Wirawan, 2012). Faktor-faktor yang membentuk budaya patron-klien semakin nyata dalam praktik PKH. Pertama, faktor ekonomi menjadi dominan karena KPM sangat bergantung pada bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketergantungan ini menjadikan posisi patron (pendamping maupun elit politik) lebih kuat. Kedua, faktor sosial tradisional, seperti nilai hierarki dan penghormatan pada otoritas, turut memperkuat posisi pendamping PKH sebagai figur yang dipatuhi. Ketiga, faktor politik lokal memperlihatkan bagaimana program sosial yang seharusnya netral seringkali dipolitisasi untuk kepentingan elektoral, sehingga relasi patron-klien bukan hanya terbatas pada lingkup keseharian, tetapi juga melebar ke arena politik praktis.

Hubungan patron-klien ditandai oleh ketergantungan, personalisme, dan pertukaran timbal balik. Patron biasanya memiliki kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar, sementara klien mencari perlindungan atau keuntungan dari patron (Scott, 1972). Aspinall & Sukmajati (2016) mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin sangat bergantung pada bantuan ekonomi dari pihak yang lebih kaya atau berkuasa. Praktik patron-klien dalam PKH berimplikasi langsung pada perilaku politik masyarakat miskin. Keterpaksaan KPM untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilgub Jatim 2018 dan Pilkada Malang 2020 mencerminkan bagaimana loyalitas politik dimobilisasi melalui relasi kuasa yang terbentuk dari program sosial. Hal ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terbentuknya hubungan patron-klien, di mana patron memberikan bantuan materiil sebagai imbalan dukungan politik. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan membuat masyarakat miskin mencari perlindungan dan bantuan dari patron. Patron yang memiliki akses atau kontrol terhadap sumber daya ini dapat memanfaatkannya untuk membangun basis dukungan politik (Törnquist, 2021).

Dampak negatifnya cukup jelas, yakni penguatan kekuasaan elit politik lokal, terciptanya pasifisme politik di kalangan masyarakat miskin, serta maraknya praktik transaksional yang membuka ruang bagi korupsi dan nepotisme. Patron Mereka memanfaatkan sumber daya lokal untuk memperkuat kekuasaan dan membangun jaringan klien yang setia (Hadiz, 2010). Hal ini menegaskan bahwa budaya patron-klien tidak hanya melanggengkan ketergantungan ekonomi, tetapi juga melemahkan partisipasi politik yang sehat. Refleksi terhadap implementasi PKH memperlihatkan paradoks mendasar dalam kebijakan sosial. Program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat miskin justru berpotensi memperkuat relasi patron-klien yang melemahkan kemandirian politik mereka. PKH bukan semata instrumen kesejahteraan, melainkan juga arena reproduksi relasi kuasa di tingkat akar rumput. Kondisi ini menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia, karena relasi patron-klien yang terus dipelihara melalui bantuan sosial berisiko menghambat lahirnya budaya politik yang lebih kritis, mandiri, dan partisipatif.

Sehingga kondisi umum yang perlu dipahami dan diwaspadai adalah dampak dari Budaya Patron-Klien terhadap Budaya Politik, terutama pada masyarakat miskin seperti 1) Penguatan Kekuasaan Elit: Budaya patron-klien memperkuat posisi elit politik yang mampu mengendalikan sumber daya. Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi karena kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil orang. 2) Ketergantungan dan Pasifisme Politik: Masyarakat miskin yang bergantung pada patron cenderung pasif dalam partisipasi politik. Mereka sering kali merasa tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk mengubah kondisi mereka tanpa bantuan dari patron. Dan 3) Korupsi dan Nepotisme: Budaya patron-klien sering kali mendorong praktik korupsi dan nepotisme, di mana patron menggunakan kekuasaan mereka untuk memberikan keuntungan kepada klien mereka, sering kali mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas (Aspinall & Sukmajati, 2016; Hadiz, 2010; Scott, 1972).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lingkup studi yang difokuskan pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang membuat temuan penelitian belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial-politik yang berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan menghasilkan pemahaman mendalam, namun masih terbatas pada pengalaman subjektif informan sehingga kurang memberikan gambaran kuantitatif yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini belum secara eksplisit menyoroti faktor eksternal lain, seperti peran media atau organisasi masyarakat sipil, yang mungkin turut memengaruhi pola relasi kuasa dan klientelisme.

KESIMPULAN

Budaya politik masyarakat miskin di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akses pendidikan, dan sistem patronase. Rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat miskin dapat menghambat proses demokratisasi dan memperkuat kekuasaan elit politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan literasi politik, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat program sosialisasi politik untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Budaya patron-klien dalam masyarakat miskin di Indonesia terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, struktur sosial tradisional, dan pengaruh politik lokal semuanya berkontribusi pada terbentuknya hubungan patron-klien. Untuk mengatasi dampak negatif budaya patron-klien, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan institusi demokratis.

Relasi kuasa yang dijelaskan oleh Foucault membantu kita memahami bagaimana masyarakat miskin di Indonesia sering kali berada dalam posisi yang terpinggirkan dalam sistem politik. Kontrol informasi, praktik patronase, dan mekanisme pengawasan semuanya berkontribusi pada budaya politik yang cenderung pasif dan menerima otoritas tanpa banyak perlawanan. Dalam perspektif Foucault, relasi kuasa memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik masyarakat miskin di Indonesia. Pengetahuan dan informasi yang dikendalikan, praktik patronase, dan mekanisme pengawasan semuanya berkontribusi pada budaya politik yang pasif dan tergantung. Untuk memperkuat demokrasi dan memberdayakan masyarakat miskin, diperlukan upaya untuk mengubah relasi kuasa ini melalui pendidikan politik, transparansi informasi, dan reformasi sistem politik.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat membantu mengurangi praktik patronase dan korupsi. Program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin tanpa keterlibatan patron juga dapat membantu. Memperkuat institusi demokratis seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media independen dapat memberikan alternatif bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam politik tanpa bergantung pada patron. Mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada patron.

REKOMENDASI

Rekomendasi diarahkan pada beberapa aspek, terutama terkait penelitian lanjutan. Pertama, studi komparatif antar-daerah atau antar-program bantuan sosial akan memperkaya pemahaman tentang variasi relasi kuasa dan budaya politik masyarakat miskin. Kedua, penggunaan metode campuran (*mixed methods*)

akan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan kedalaman data kualitatif dan keluasan data kuantitatif. Ketiga, penelitian di masa depan juga dapat menelaah peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, maupun media lokal, dalam memediasi atau bahkan menantang relasi patron-klien. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperluas perspektif dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat miskin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya (UB) yang telah memberikan dukungan moral dan finansial agar pengembangan dan peta jalan peneliti bisa berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada kolega dosen yang ada di Program Studi Ilmu Politik, Departemen Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional (PPHI) FISIP UB, yang selalu menjadi teman diskusi yang suportif terkait pengembangan penelitian peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Patronage and clientelism in Indonesian electoral politics. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, 1–38.

Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Wiley.

Demokrasi, E. G. (2025, July 4). *Oknum Caleg Ancam Warga Penerima PKH dicoret. Ampera: Hentikan Politisasi Bantuan Sosial*. Https://Www.Puskapik.Com/33229/Seputar-Pantura/Oknum-Caleg-Ancam-Warga-Penerima-Pkh-Dicoret-Ampera-Hentikan-Politisasi-Bantuan-Sosial/ .

Firdausya, R. A., & Urfan, N. F. (2024). Analisis Framing Robert N Entman: Keberpihakan Presiden Dalam Keikutsertaan Pemilu 2024 Di Kompas. Com Dan Cnnindonesia. Com. CNNINDONESIA. COM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *11*(5), 1814–1821.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*.

Foucault, M., & Gordon, C. (1980). *Power/knowledge : selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.

Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia : a Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Haliim, W. (2018). Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *3*(1), 43–55. https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.43-55

Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, *17*, 39–53.

Haliim, W. (2021). Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, *18*(2), 196–216. https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i2.5300

Haliim, W. (2023). Social and Bureaucratic Problems in Social Policy Implementation in Indonesia: A Study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *7*(1), 105–129. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533

Haliim, W., Ferdiansyah, F., & Sasmita, A. Y. E. S. (2024). Power Relations between Program Keluarga Harapan (PKH) Facilitators and Beneficiary Families (KPM) (Study on PKH Implementation in Malang Regency). *International Journal of Current Science Research and Review*, *07*(02). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i2-13

Husen, A. F. (2024). Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, *14*(2), 262–270. https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1853

Inglehart, R. (1997). *Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm2ns

Koentjaraninggrat. (1983). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.

Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mudhoffir, A. M., Trisnanti, D. S., Hugo, F., Anugrah, I., Sasongko, K. H., Supriatma, M., Ridha, M., Tampubolon, Y. H., & Pontoh, C. H. (2023). *Marxisme, Kelas Menengah dan Politik Sebuah Perdebatan*. Pustaka IndoPROGRESS.

Patmah, N., & Mayrudin, Y. M. (2025). Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 384–400.

Pureklolon, T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia: Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, *3*(1), 405–430. https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.147

Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, *05*(1), 169–180.

Ridwan, M., & Kamalina, A. R. (2025, July 5). *Bansos Era Jokowi vs SBY: Dulu Antipati Kini Digandrungi*. Https://Plus.Bisnis.Com/Read/Bansos-Era-Jokowi-vs-Sby-Dulu-Antipati-Kini-Digandrungi.

Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, *66*(1), 91–113. https://doi.org/10.2307/1959280

Suhantoro, Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi*. Kramantara JS.

Syafira, F. R. (2024). *Fungsi Pengawasan Dalam Proses Perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok (Studi Kasus: Pengawasan Partai Gerindra)* [Disertasi]. Universitas Nasional.

Syahdanul, F., & Muhammad. (2025). Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(3), 468–482.

Tantra, D. K. (1994). Penelitian Kualitatif, Suatu Persfektif dalam Pengungkapan Realita Alam Semesta. In *STKIP Agama Hindu Singaraja*. Makalah Seminar.

Törnquist, O. (2021). *Social Democratic Challenges in the South – And Why They Matter for the North Too* * (pp. 15–36). https://doi.org/10.1108/S0195-631020210000035002

Wartajurnalis. (2025, July 6). *Dukung Program KDS, 38 Anggota DPRD Depok Sebut Harus Transparan dan Dinilai Penuh Nuansa Politisasi*. Https://Www.Wartajurnalis.Com/Dukung-Program-Kds-38-Anggota-Dprd-Depok-Sebut-Harus-Transparan-Dan-Dinilai-Penuh-Nuansa-Politisasi/ .

Wildavsky, A. (1987). Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. *American Political Science Review*, *81*(1), 3–21. https://doi.org/10.2307/1960776

Winarko, D. A. (2025, July 3). *Jokowi Kucurkan Bansos Ribuan Triliun, Kemiskinan hanya Turun 2%*. Https://Infografis.Sindonews.Com/Photo/27915/Jokowi-Kucurkan-Bansos-Ribuan-Triliun-Kemiskinan-Hanya-Turun-2-1707177597.

Wirawan, I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.